

## Pemahaman Guru Sekolah Dasar Terhadap Kebijakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar

I Nyoman Laba Jayanta, Gusti Ngurah Sastra Agustika

Jurusan Pendidikan Dasar FIP Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia  
Email: laba.jayanta@undiksha.ac.id, gn.sastra.a@undiksha.ac.id

### ABSTRACT

*This research aims to determine the level of understanding of elementary school teachers toward the use of Merdeka Belajar Lesson Plan (RPP). Data of the teachers' understanding were obtained from a survey conducted in 82 public and private schools in Buleleng District. Nonprobability Sample Technique with the Purposive Sampling type was used in this research. Then, there were 94 respondents involved. The data collection instrument was in the form of a questionnaire and then the data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of the analysis were then compared with the criteria to determine the level of teacher understanding of the lesson plans. The level of teachers' understanding of Merdeka Belajar lesson plan reaches a score of 66.12% and it belonged to the Sufficient category. When viewed from each indicator, two indicators were still in the sufficient category, namely: 1) the teacher's understanding of the number of pages required in the lesson plan for free learning, 2) the use of lesson plans in learning activities. Meanwhile, the teacher's understanding of the compulsory components in the Merdeka Belajar lesson plan was in Good category and the use of lesson plan in learning activities is in Very Good category. Increasing teachers' understanding of Merdeka Belajar lesson plan can be done by reading, participating in KKG discussions, discussions with peers, mentoring, and mentoring by school supervisors and school principals.*

**Keywords:** merdeka belajar, lesson plans, elementary school teachers

### ABSTRAK

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman guru-guru sekolah dasar tentang penggunaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Merdeka Belajar. Data pemahaman guru didapat dari survey yang dilakukan di 82 sekolah negeri dan swasta yang berada di Kecamatan Buleleng. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Teknik Nonprobability Sample* dengan tipe *Puposive Sampling*, berdasarkan teknik tersebut didapatkan responden dengan sebanyak 94 orang. Alat pengambilan data berupa angket selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan kriteria untuk menentukan tingkat pemahaman guru tentang RPP Merdeka Belajar. Tingkat pemahaman guru tentang RPP Merdeka Belajar mencapai skor 66.11% dan berada pada kategori Cukup. Jika dilihat dari masing-masing indikator terdapat dua indikator yang masih berkategori cukup, yaitu: 1) pemahaman guru terhadap jumlah halaman yang wajib dalam RPP Merdeka Belajar, 2) penggunaan RPP dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pemahaman guru tentang komponen wajib dalam RPP Merdeka Belajar berada pada kategori Baik dan penggunaan RPP dalam kegiatan pembelajaran berada dalam kategori Sangat Baik. Peningkatan pemahaman guru tentang RPP Merdeka Belajar dapat dilakukan dengan cara: membaca, mengikuti kegiatan diskusi KKG, diskusi dengan teman sejawat, pembimbingan dan pendampingan oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah.

**Kata kunci:** merdeka belajar, rencana pelaksanaan pembelajaran, guru sekolah dasar

### 1. Pendahuluan

Tahun ajaran 2013/2014 Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerapkan kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum 2013. Kurikulum ini dibuat untuk menggantikan kurikulum KTSP 2016. Pengantian kurikulum ini diharapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dari kurikulum sebelumnya sehingga melalui penerapan Kurikulum 2013 dapat menghasilkan siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam perjalanannya evaluasi Kurikulum 2013 terus dilakukan setiap tahunnya untuk melihat apakah pelaksanaan kurikulum telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan dan perkembangan telah terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai akibat perubahan global yang menuntut

perlu adanya perbaikan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan maupun penyempurnaan kurikulum. Presiden Joko Widodo dalam masa jabatan periode kedua, telah melantik kabinet kerja jilid 2 yang diberi nama sebagai Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 23 Oktober 2019. Pada kesempatan tersebut presiden mempercayakan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah awal yang dilakukan Nadiem untuk dunia pendidikan adalah menyampaikan konsep Merdeka Belajar dan Guru Bergerak. Merdeka Belajar artinya memberikan kebebasan bagi sekolah, guru-guru, dan muridnya. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Dimana konsep ini selajen dengan aliran pendidikan progresivisme John Dewey yang memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan dalam mengelola dan mengeksplorasi kemampuan peserta didik (Mustaghfiroh, 2020). Sedangkan Guru Bergerak mengajak para guru untuk mengambil inisiatif melakukan inovasi dalam menciptakan suasana belajar yang menarik bagi peserta didik. Salah satu dari empat kebijakan merdeka belajar adalah penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dipertegas dengan surat edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP. Ada empat poin pokok dalam surat edaran tersebut antara lain: 1) penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi pada murid; 2) komponen wajib dalam RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran; 3) kelompok guru mata pelajaran dan guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan format RPP untuk mencapai keberhasilan belajar siswa; 4) guru masih diijinkan untuk tetap menggunakan RPP sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran. Kebijakan tersebut dibuat bukan tanpa alasan, kebijakan ini sebagai jawaban atas keluhan guru-guru tentang kewajiban administrasi yang harus dilengkapi guru sehingga mengganggu esensi dari kegiatan pembelajaran yaitu mengajar itu sendiri (Melati & Utanto, 2016).

Kebijakan tersebut tentunya menjadi kewajiban seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakan baik dari jenjang sekolah dasar maupun menengah. Buleleng sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang dijuluki sebagai kota Pendidikan. Kabupaten Buleleng memiliki 9 kecamatan dengan total sekolah dasar berjumlah 484 sekolah. Dengan jumlah sekolah dasar yang banyak tentunya perlu upaya dan strategi pemerintah daerah untuk memberikan informasi-informasi baru terkait kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dapat sampai kepada guru-guru. Penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun melalui pertemuan-pertemuan musyawarah guru. Namun penting dilakukan evaluasi apakah kebijakan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh guru sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan tersebut. Langkah kebijakan merdeka belajar terkait penyederhanaan RPP merupakan kebijakan yang diambil pemerintah sebagai upaya mengatasi keluhan dan permasalahan yang dihadapi guru selama ini. Konsep Merdeka Belajar diambil dalam upaya memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran sesuai dengan keperluan peserta didik. Konsep Merdeka Belajar sebenarnya sudah dipikirkan oleh pendahulu pendidikan bapak Ki Hajar Dewantara dengan konsepnya sistem Among. Melalui konsep tersebut pendidikan diharapkan mampu menyokong kodrat alami anak, dimana pendidikan diharapkan dapat memberikan kebebasan secara lahir dan batin untuk mengenali kodrat alamiah dan kebebasan dalam cipta, karya, dan karsa (Noventari, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas perlu dilakukan kajian yang mampu memberikan gambaran apakah kebijakan merdeka belajar dan juga surat edaran Mendikbud tentang penyederhanaan RPP telah mampu menjawab permasalahan guru selama ini terkait penyusunan RPP atau sebaliknya tidak membawa perubahan yang berarti. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji sejauhmana implementasi kebijakan Merdeka Belajar dengan menfokuskan pada implementasi kebijakan penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh guru-guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Buleleng.

## **2. Metode**

Penelitian ini ada penelitian deskriptif dengan metode survey, dengan obyek penelitian para guru Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng. Data pemahaman guru diperoleh dari survey sampel

yang berasal dari 82 Sekolah Swasta dan Negeri yang berada di Kecamatan Buleleng. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *Nonprobability Sample* dengan tipe *Puposive Sampling*, berdasarkan teknik tersebut didapatkan responden dengan sebanyak 94 orang guru yang berasal dari 30 sekolah sampel. Alat pengambilan data yang digunakan berupa angket. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif yang berupa rerata dan persentase. Hasil analisis data kemudian dibandingkan dengan tabel kriteria pemahaman guru sebagaimana yang tertera pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria untuk Menentukan Tingkat Pemahaman Guru

Skor	Kriteria
0 – 55.00%	Kurang
55.01 – 70.00	Cukup
70.01 – 85.00%	Baik
85.01 – 100%	Sangat Baik

### 3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemahaman guru terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar, berikut disajikan ringkasan hasil analisis data tingkat pemahaman guru baik secara keseluruhan maupun di setiap indikator dalam tabel 2 berikut.

No	Butir Pertanyaan	Capaian %	Kriteria
1	Komponen Wajib dalam RPP Merdeka Belajar	76.60	Baik
2	Pemahaman terhadap Prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan RPP Merdeka Belajar	44.68	Kurang
3	Jumlah Halaman pada RPP Merdeka Belajar	55.32	Cukup
4	Penggunaan RPP Merdeka Belajar dalam kegiatan pembelajaran	62.77	Cukup
5	Penggunaan RPP sebelumnya dalam pembelajaran	86.17	Sangat Baik
<b>Total</b>		<b>65.11</b>	Cukup

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa pemahaman guru tentang pengembangan RPP Merdeka Belajar mencapai skor rata-rata 66.11% atau kategori Cukup. Rerata skor terendah adalah pemahaman tentang prinsip dalam penyusunan RPP Merdeka Belajar dengan rerata skor 44.68%, sedangkan indikator yang mempunyai rerata skor tertinggi adalah pemahaman tentang penggunaan RPP sebelum edaran Mereka Belajar dengan rerata skor 86.17% atau kategori Sangat Baik.

Indikator pemahaman guru tentang RPP Merdeka Belajar dipaparkan dalam lima indikator yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang. Lima indikator tersebut yaitu: 1) Komponen yang wajib terdapat pada RPP Merdeka Belajar; 2) Prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan RPP Merdeke Belajar; 3) Jumlah halaman yang diperlukan pada RPP Merdeka Belajar; 4) penggunaan RPP Merdeka Belajar dalam kegiatan pembelajaran; 5) penggunaan RPP sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran.

Indikator pertama tentang komponen wajib dalam RPP Merdeka Belajar. Indikator ini mengacu pada ketentuan RPP Merdeka Belajar (RI, 2019), dalam RPP harus membuat tiga komponen wajib yaitu: tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Berdasarkan analisis data, dari 94 responden sebanyak 72 responden yang memberikan jawaban mencakup tiga komponen wajib tersebut, namun demikian dalam RPP para guru juga menambahkan komponen lain seperti hanya identitas sekolah, kelas/semester, alokasi waktu, materi pokok. Penambahan komponen tersebut diijinkan sesuai dengan surat edaran Penyederhaan RPP, dimana komponen yang ditambahkan sesuai dengan 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (RI, 2016).

Indikator kedua berkaitan dengan pemahaman guru tentang prinsip yang digunakan dalam menyusun RPP Merdeka Belajar. Prinsip yang digunakan yaitu efisiensi, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Melalui konsep ini diharapkan Guru meringankan beban administrasi guru dan memberikan kebebasan kepada guru untuk melakukan inovasi dan berkreasi dalam proses pembelajaran. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan tingkat pemahaman guru berada pada kategori Kurang dengan presentase 44.68%. Data tersebut menunjukkan hanya 42 orang responden yang sudah memahi prinsip yang digunakan dalam penyusunan RPP Merdeka Belajar dan 52 lainnya belum memahami prinsip dalam penyusunan RPP Merdeka Belajar. Dalam praktiknya guru masih banyak yang menggunakan RPP dengan format lama sesuai Kurikulum 2013.

Indikator ketiga mengacu pada pemahaman tentang jumlah halaman dalam RPP merdeka belajar, berdasarkan tabel 1 pemahan guru terkait hal tersebut dengan kategori Cukup. Data analisis menunjukkan sebanyak 52 reponses atau 55.3% yang memahami konsep aturan tersebut. Berdasarkan pedoman penyederhaan RPP Merdeka Belajar dalam penyusunan RPP tidak ditentukan terkait jumlah halaman, banyaknya lembaran dalam dokumen RPP diberikan kebebasan kepada masing-masing guru sesuai dengan konsep efisien, efektif, dan berorientasi kepada peserta didik. Jika menurut guru dengan RPP hanya 1 lembar saja sudah cukup menjadi panduan guru dalam pengajar hal tersebut diijinkan.

Indikator keempat, pada bagian ini dianalisis pemahami guru tentang penggunaan RPP Merdeka Belajar. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan apakah satu RPP hanya dapat digunakan untuk satu pertemuan saja. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa 62.77% responden sudah memahami ketentuan tersebut. Dalam penyusunan dan penggunaan RPP, satu RPP dapat digunakan untuk satu pertemuan atau lebih. Penyusunan RPP disesuaikan kedalaman materi yang akan disampaikan sehingga dalam proses pembelajaran menyesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang disusun.

Indikator kelima berkaitan dengan pemahaman guru tentang penggunaan RPP sesuai format sebelumnya. Sesuai ketentuan dalam pedoman penyederhaan RPP Merdeka Belajar, guru masih diberikan kebebasan untuk menggunakan RPP dengan format sebelumnya atau guru dapat memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada peserta didik. Berdasarkan analisis data 86.17% responden sudah memahami konsep tersebut.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru terkait kebijakan RPP Merdeka Belajar masuk dalam kategori Cukup. Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru belum memahami secara menyeluruh konsep RPP Merdeka Belajar. Kurang pemahamn guru disebabkan oleh beberapa faktor seperti halnya masih rendahnya literasi guru. Pemerintah sudah memberikan penjelasan mengenai implementasi RPP Merdeka Belajar melalui Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kepada seluruh kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam edaran tersebut dijelaskan tentang konsep penyederhaan RPP. Kemudian surat edaran ini diperjelas melalui penerbitan Buku Saku Tanya Jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Buku tersebut menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang, konsep, dan ketentuan penyusunan RPP Merdeka Belajar. Sehingga melalui pedoman tersebut diharapkan guru-guru dapat memahami kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun dalam kenyataannya bersarkan survey yang dilakukan belum sepenuhnya guru memahami kebijakan tersebut. Hal lain yang menyebabkan rendahnya pemahaman guru adalah akibat pandemic Covid-19. Kebijakan RPP Merdeka belajar disampaikan pada bulan Desember 2019, kemudian dalam perjalanannya pada bulan maret Mendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Setelah penerbitan surat tersebut para guru fokus pada pengembangan dan penyampaian konten materi secara *online*, dengan waktu yang mendesak guru-guru masih menggunakan RPP dengan format sebelumnya untuk membuat rancangan konten materi untuk pembelajaran *online*.

Mengacu pada temuan tersebut perlu upaya-upaya pemerintah untuk mengedukasi para guru agar lebih memahami kebijakan tersebut, dengan tingginya tingkat pemahaman guru diharapkan dapat tercapainya tujuan pemerintah. Melalui kebijakan ini diharapkan guru-guru tidak lagi terjebak

dengan kebijakan administrasi sehingga waktu yang dimiliki guru lebih banyak untuk mengembangkan ide-ide kreatif untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang mendidik anak menjadi manusia merdeka hatinya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya (Istiq'faroh, 2020). Pembelajaran yang bermakna yang memberikan kebebasan dan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kreatifitasnya untuk mencipta, karya, dan karsa.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pemahaman guru sekolah dasar di Kecamatan Buleleng tentang RPP Merdeka Belajar masuk dalam kategori Cukup dengan presentase sebesar 66.11%. Jika dilihat dari capaian per indikator terdapat dua indikator yang masih berada pada kategori cukup, yaitu: 1) pemahaman guru terhadap jumlah halaman yang wajib dalam RPP Merdeka Belajar, 2) penggunaan RPP sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pemahaman guru tentang komponen wajib dalam RPP Merdeka Belajar berada pada kategori Baik dan penggunaan RPP Merdeka Belajar dalam kegiatan pembelajaran berada dalam kategori Sangat Baik. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Buku Saku Tanya Jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP ternyata masih banyak guru yang belum memahami kebijakan tersebut secara menyeluruh, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman guru. Peningkatan pemahaman guru dapat dilakukan dengan cara: membaca pedoman terkait kebijakan Merdeka Belajar, mengikuti kegiatan diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG), seminar pembelajaran di sekolah atau kabupaten/kota, diskusi dengan teman sejawat, pembimbingan dan pendampingan oleh pengawas sekolah dan juga kepala sekolah.

#### Daftar Rujukan

- Istiq'faroh, N. (2020). RELEVANSI FILOSOFI KI HAJAR DEWANTARA SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL MERDEKA BELAJAR DI INDONESIA. *Lintang Songo : Jurnal Pendidikan*, 3(2), 1–10. Retrieved from <https://www.journal.unusida.ac.id/index.php/jls/article/view/266>
- Melati, E. R., & Utanto, Y. (2016). Kendala Guru Sekolah Dasar dalam Memahami Kurikulum 2013. *Learning & Technology Library (LearnTechLib)*, 4(1), 1–9. Retrieved from <https://www.learntechlib.org/p/209278/>
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>
- Noventari, W. (2020). Konsepsi Merdeka Belajar Dalam Sistem Among Menurut Pandangan Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 83–91. <https://doi.org/10.20961/PKNP.V15I1.44902>
- RI. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. , (2016).
- RI. Surat Edaran Mendikbud tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Nomor 14 Tahun 2019. , (2019).